



Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Peningkatan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Pringsewu

Muhamad Basri¹, Yulianto¹, Ita Prihantika¹

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Lampung, Bandar Lampung

Email: Muhammad.basri1559@gmail.com

Abstrak

Kepala desa hari ini pada kenyataannya bukan lagi sebagai perpanjangan tangan pemerintah supra desa, melainkan sudah menjadi tokoh yang bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan desa mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Hal tersebut menjadi nilai positif apabila kepala desa mampu untuk terus melakukan pembangunan sehingga menjadi desa mandiri sesuai dengan klasifikasi IDM. IDM sendiri merupakan instrumen untuk mengukur dan mengetahui status desa tertentu. Berdasarkan hasil rekapitulasi IDM tahun 2018 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon bahwa Kabupaten Pringsewu tercatat hanya memiliki 1 desa mandiri. Akan tetapi pada tahun berikutnya yaitu 2019-2020 jumlah tersebut terus mengalami perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepemimpinan kepala desa dalam peningkatan IDM di Kabupaten Pringsewu serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Jenis penelitian ini ialah deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang berupa reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan tiga fokus utama yaitu peran Motivator, Fasilitator, dan Mobilisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan kepala desa dalam peningkatan IDM di Kabupaten Pringsewu sudah dilakukan dengan baik, Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa peran tersebut kurang berpengaruh terhadap peningkatan status desa. Hal ini dipengaruhi secara langsung oleh struktur sosial dan tingkat partisipasi masyarakatnya. Fluktuasi status desa yang terjadi ternyata dipengaruhi oleh jumlah dan porsi alokasi dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa dari tahun 2018, 2019, dan 2020

Kata kunci: kepemimpinan, kepala desa, Indeks Desa Membangun

Abstract

Today's village head is in fact no longer an extension of the supra-village government, but has become a figure in charge of the course of village government from planning to evaluation. This is a positive value if the village head is able to continue to develop so that it becomes an independent village in accordance with the IDM classification. IDM itself is an instrument to measure and find out the status of a particular village. Based on the results of the 2018 IDM recapitulation from the Community Empowerment Office and Pekon, Pringsewu Regency is recorded to have only 1 independent village. However, in the following year, namely 2019-2020, the number continues to change. This study aims to determine the leadership role of village heads in improving IDM in Pringsewu Regency and the factors that

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: 02/11/2020

Ditelaah: 10/02/2021

Diterbitkan: 20/06/2021

KUTIPAN

Basri, M., Yulianto, Y., Prihantika, I. (2021). Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Peningkatan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Pringsewu. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 15-24, doi: 10.47753/pjap.v2i1.26





influence it. This type of research is descriptive with qualitative methods. The data collection techniques used are interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions with three main focuses, namely the role of Motivator, Facilitator, and Mobilizer. The results showed that the leadership role of the village head in improving IDM in Pringsewu Regency has been done well, but it is undeniable that this role has less influence on improving the status of the village. It is directly influenced by the social structure and the level of participation of its people. Fluctuations in village status that occur are apparently influenced by the amount and portion of fund allocation as stipulated in the Minister of Finance Regulation on Village Fund Management from 2018, 2019, and 2020.

Keywords: leadership, village head, village development index

PENDAHULUAN

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU No. 6/2014) tentang Desa yang merefleksikan semangat dan penghargaan terhadap desa atau disebut dengan nama lain yang diakui telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. UU ini juga mengonstruksi kewenangan desa dalam pasal 18 yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Adapun di pasal 19 kewenangan desa meliputi: (a) kewenangan berdasarkan hak asal usul; (b) kewenangan lokal berskala desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah melalui Kemeterian Desa menerbitkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permen Desa, PDTT) No. 2/2016) tentang Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai instrumen pendukung terhadap UU Desa untuk mengetahui perkembangan desa sejak dianggarkannya dana desa tersebut. Permendesa ini mengklasifikasikan desa menjadi lima status yaitu: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi 5 status desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan (Hamidi dkk, 2015, h. 5). IDM merupakan indeks komposit yang terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

Kabupaten Pringsewu yang tercatat sebagai kabupaten termuda di Provinsi Lampung sekaligus kabupaten dengan luas wilayah paling kecil. Berdasarkan data Dinas PMP Kabupaten Pringsewu tentang IDM dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi sttus desa yang cukup jelas. Pada 2018 hanya memiliki 1 desa mandiri dan 5 desa maju. Kemudian tahun 2019 terjadi perubahan pada jumlah desa yang berstatus maju dan berkembang. Di tahun 2020 sudah tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal. Hasil rekapitulasi IDM dari tahun 2018-2020 ditunjukkan Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel.

Tabel 1 Hasil Rekapitulasi IDM Kabupaten Pringsewu Tahun 2018

No.	Keca-matan	STATUS DESA					Jumlah Desa
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	



1	Pardasuka	-	-	2	10	1	13
2	Ambarawa	-	-	3	5	-	8
3	Pagelaran	-	2	12	7	1	22
4	Pagelaran Utara	-	-	4	6	-	10
5	Pringsewu	-	-	5	5	-	10
6	Gadingrejo	-	-	19	4	-	23
7	Sukoharjo	-	1	12	3	-	16
8	Banyumas	-	1	5	5	-	11
9	Adiluwih	1	1	6	5	-	13
JUMLAH		1	5	68	50	2	126

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon¹ Kabupaten Pringsewu Tahun 2018.

Tabel 2 Hasil Rekapitulasi IDM Kabupaten Pringsewu Tahun 2019

No.	Kecamatan	STATUS DESA				Jumlah Desa
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	
1	Parda-uka	-	-	5	8	13
2	Ambarawa	-	1	7	-	8
3	Pagelaran	-	4	18	-	22
4	Pagelaran Utara	-	-	7	3	10
5	Pringsewu	-	4	6	-	10
6	Gadingrejo	-	4	19	-	23
7	Sukoharjo	-	1	15	-	16
8	Banyumas	-	2	9	-	11
9	Adiluwih	1	3	9	-	13
JUMLAH		1	19	95	11	126

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu Tahun 2019.

Tabel 3 Hasil Rekapitulasi IDM Kabupaten Pringsewu Tahun 2020

No.	Kecamatan	STATUS DESA				Jumlah Desa
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	
1	Pardasuka	-	-	13	-	13
2	Ambarawa	-	1	7	-	8
3	Pagelaran	1	4	17	-	22
4	Pagelaran Utara	-	1	9	-	10
5	Pringsewu	1	4	5	-	10
6	Gadingrejo	-	12	11	-	23
7	Sukoharjo	-	3	13	-	16
8	Banyumas	-	7	4	-	11
9	Adiluwih	1	5	7	-	13
JUMLAH		3	37	86	0	126

¹ Penyebutan desa dalam bahasa daerah Provinsi Lampung



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu Tahun 2020.

Tjokroamidjojo (2000) dalam bukunya menyebutkan bahwa kepala desa memiliki tiga peran utama yaitu motivator, fasilitator, dan mobilisator. Tiga peran tersebut selanjutnya diejawantahkan menjadi gerak kepala desa untuk memicu keterlibatan masyarakat dalam mencapai tujuan, memfasilitasi masyarakat agar memperoleh pelayanan publik dengan mengusahakan sarana dan prasarana dapat hadir untuk diakses oleh masyarakat desa, serta menggerakkan masyarakat agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Realitas yang menunjukkan bahwa adanya fluktuasi status IDM sesuai dengan tabel 1, 2, dan 3 tersebut tentu menjadi pertanyaan bagaimana hal itu bisa terjadi sedangkan setiap desa sudah memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan UU, sehingga pada akhirnya menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang peran kepemimpinan kepala desa dalam peningkatan IDM di Kabupaten Pringsewu serta apa saja faktor-faktor yang memengaruhinya.

TINJAUAN PUSTAKA

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga memengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah, maupun bawahan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial (Soekanto, 2017).

Pada suatu organisasi, faktor kepemimpinan memegang peranan yang penting karena pemimpin itulah yang akan menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sekaligus merupakan tugas yang tidak mudah. Tidak mudah karena harus memahami setiap perilaku bawahan yang berbeda-beda. Bawahan dipengaruhi sedemikian rupa sehingga bisa memberikan pengabdian dan pertisipasinya kepada organisasi secara efektif dan efisien (Sutrisno, 2016).

Desa yang merupakan organisasi pemerintahan yang didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat yang berada pada suatu wilayah dengan hak hukum yang sama dalam sistem pemerintahan nasional. Bab I pasal 1 angka 1 UU Desa memberikan definisi yaitu “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” (UU No. 6 tentang Desa, 2014).

Kepala desa merupakan pemegang jabatan tertinggi dalam struktur pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah (Permendagri No. 83 tentang P. dan P. P. D., 2015, Pasal 1, Ayat 4). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (UU No. 6 tentang Desa, 2014, Pasal 16, Ayat 1).

Tjokroamidjojo dalam e-Journal Syafitri dan Suriani Lilis (2019) menyebutkan kepala desa memiliki tiga peran utama yaitu motivator, fasilitator, dan mobilisator. Pertama motivator, yaitu memberikan dorongan kepada masyarakat agar terpicu untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Fokus ini ingin



melihat metode yang digunakan oleh kepala desa dalam memotivasi masyarakat agar ikut serta dalam kegiatan pembangunan desa khususnya bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Kedua, mobilisator, yaitu menyediakan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembangunan desa secara bertanggung jawab sehingga memudahkan aktivitas yang berlangsung didalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan memfasilitasi atau melengkapi kebutuhan, sarana dan prasarana yang mendukung proses pemerintahan dan pembangunan desa. Juga bertindak untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai penunjang dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia desa baik di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Terakhir yaitu bagaimana kepala desa menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa. Peran mobilisasi ini meliputi proses penyampaian informasi kepada masyarakat yang kemudian menjadi gerakan nyata dalam bentuk partisipasi pembangunan desa bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kepala desa sebagai perencana, penggerak, penanggungjawab, serta pelopor pembangunan yang sangat penting dalam mengadakan pendekatan untuk menumbuhkan serta mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat merealisasikan pembangunan yang telah direncanakan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif dengan metode kualitatif. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dari satu variabel (Noor, 2012). Metode kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Motivator

Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah (Rivai dan Mulyadi, 2011; Pasolong, 2015). Hasil penelitian yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa peran kepala desa sudah dilakukan pada tahap ini. Ketahanan sosial sendiri merupakan indeks pertama untuk mengetahui tingkat kemandirian suatu desa. Konteks ketahanan sosial sendiri sebenarnya lebih banyak membahas mengenai ada atau tidaknya sarana dan prasana umum untuk kepentingan masyarakat.

Adiluwih dan Sukoharjo III sebagai desa terbaik Di Kabupaten Pringsewu memiliki sarana dan prasarana umum yang lengkap dibandingkan dengan desa lainnya, sehingga menjadikan kedua desa menyandang status mandiri dan maju. Selain itu bisa kita lihat dari keseluruhan hasil wawancara bahwa mereka sampai saat ini masih melestarikan budaya sosial masyarakat seperti gotong royong, siskamling dan musyawarah. Sebaliknya dengan Podosari, Margosari dan Sukaratu yang statusnya secara berurutan yaitu berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal terus berupaya untuk meningkatkan ketahanan sosial dengan memberikan semangat kepada masyarakat serta terus melakukan pembangunan sarana dan prasarana publik sehingga layak untuk naik status. Seperti yang disampaikan Koontz tentang pengertian motivasi yang dikutip oleh Hasibuan (1996) bahwa motivasi mengacu pada dorongan dan usaha untuk kebutuhan atau untuk mencapai suatu tujuan (Utami, 2011). Tujuan untuk menjadi desa mandiri itulah yang mendorong mereka untuk terus berupaya meningkatkan IDM.



Menurut Widjaja (1986) teknik memotivasi adalah secara verbal (berbincang-bincang), melalui media massa dan dengan tindakan-tindakan nyata (Rudiah, Setiawan B., dan Susiani, 2018). Hal ini koheren dengan hasil penelitian karena memang kepala desa memotivasi masyarakat dengan melakukan tindakan-tindakan nyata. Metode tersebut dilakukan oleh semua kepala desa karena kondisi sosial budaya masyarakat pedesaan yang menjadikan sosok pemimpin sebagai contoh baik dalam hal tutur kata dan tingkah laku.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 26 Ayat 4 menyatakan kepala desa berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Uniknya di desa mandiri rata-rata masyarakatnya adalah berprofesi sebagai petani. Seperti yang kita ketahui bahwa Desa Adiluwih berstatus mandiri, akan tetapi memiliki luas lahan persawahan yaitu 100 Ha dan 399 adalah luas lahan pertanian bukan sawah (BPS Kabupaten Pringsewu, 2019). Berbeda dengan Sukoharjo III yang memang mayoritas penduduknya berwirausaha dan pegawai - baik negeri maupun swasta. Kepala desa sebagai motivator memberikan dorongan kepada masyarakat terutama kepada kelompok-kelompok usaha untuk meningkatkan perekonomian desa. *Direct motivation* diberikan oleh kepala desa pada rapat-rapat formal dan nonformal agar mereka dapat memanfaatkan koperasi dan BUM Pekon sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Hasibuan (2014) mengatakan bahwa ada dua metode motivasi yaitu: motivasi langsung (*direct motivation*) dan motivasi tidak langsung (*indirect motivation*). Motivasi langsung adalah motivasi (materiil dan Non Materiil) yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya, jadi sifatnya khusus seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus dan bintang jasa. Motivasi Tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Misalnya ruangan kerja yang nyaman, suasana pekerjaan yang serasi dan sejenisnya. Artinya kepala desa sudah berperan sebagaimana seharusnya dalam memotivasi warga dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan. Akan tetapi, perubahan menyeluruh untuk sebuah desa dalam status ekonomi warganya bukan hanya tanggung jawab kepala desa. Butuh waktu yang tidak sebentar untuk sebuah desa tertinggal sampai pada tahap maju.

Kemudian peran desa dalam pembangunan haruslah ramah terhadap lingkungan dan bersifat berkelanjutan. Menciptakan lingkungan yang indah, bersih namun juga tidak merusak alam. Tujuan pembangunan ini membutuhkan peran desa agar kesadaran masyarakat meningkat akan pentingnya menjaga nilai ekologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran motivasi kepala desa sudah menyampaikan setidaknya "*awareness*" terhadap nilai-nilai ekologi. Desa Margosari yang secara geografis berada di daerah perbukitan harus memastikan tidak ada sungai yang tercemar oleh sampah. Daerah perbukitan rawan terjadi bencana alam -tanah longsor, kelangkaan air dan banjir. Oleh sebab itu kepala desa senantiasa mendorong masyarakat agar menjaga kualitas lingkungan sehingga sejalan dengan UU Desa pasal 26 ayat 4 bahwa kepala desa wajib untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Meskipun kepala desa sudah menjalankan perannya dengan baik, akan tetapi nilai IDM menunjukkan hasil yang berbeda. Peneliti mendapatkan faktor ini akibat kurangnya tingkat partisipasi masyarakatnya. Salah satu fungsi pemimpin yang berkaitan dengan motivator adalah partisipasi dalam menjalankan fungsi partisipasi pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai posisi masing-masing (Rivai dan Mulyadi, 2011; Pasolong, 2015).

Fasilitator

Seorang pemimpin harus responsif terhadap kebutuhan orang atau kelompok yang dipimpinya berkaitan dengan pemberian motivasi kesempatan dan dukungan kepada masyarakat. ASTD (1998) dalam M. Soim dan Achmad Ghazali Syafe'I (2018) mengemukakan bahwa fasilitator berperan sebagai sumber



informasi sekaligus mengelola, menganalisis, dan mendesimilasikan dalam berbagai cara atau pendekatan yang dianggap efektif. Fasilitator harus dapat memberikan motivasi serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan kelembagaan, dalam kegiatan tersebut fasilitator masyarakat dapat memberikan fasilitas pelaksanaan diskusi antara anggota masyarakat. Hal ini fasilitator mempunyai tugas untuk menggerakkan diskusi supaya aspirasi setiap anggota dapat terpenuhi (Atrika, 2020). Peran ini terlihat pada saat kepala desa memfasilitasi aspirasi masyarakat dengan musrenbang atau rembuk pekon. Saat ini sepertinya tidak ada desa yang tidak melaksanakan jaring asmara atau jaringan aspirasi masyarakat. Jaringan asmara ini diwujudkan dalam bentuk musrenbang mulai dari tingkat dusun sampai tingkat kecamatan. Di dalam musrenbang kepala desa juga berperan sebagai sumber informasi sekaligus mengelola, menganalisis, dan mendesimilasikan aspirasi masyarakat. Fasilitasi juga dilakukan pada kegiatan gotong royong serta siskamling yang dalam pelaksanaannya kepala desa memberikan fasilitas berupa menyediakan alat-alat yang dibutuhkan untuk bergotong royong seperti mesin pemotong rumput kotak sampah dll. Kemudian siskamling, kepala desa memfasilitasinya dengan membuat jadwal ronda. Secara umum tidak ada fasilitasi secara khusus yang diberikan oleh kepala desa kepada masyarakat. Kepala desa pada umumnya menjadi fasilitator pada koridornya masing-masing.

Peran lainnya dapat dilihat pada saat dilaksanakannya program pembuatan jalan usaha tani di Desa Podosari. Kepala Desa Podosari menjalankan salah satu fungsi fasilitator yaitu memecahkan masalah. Beliau mempertemukan antar stakeholder yaitu para petani dan pemilik lahan yang tanahnya akan dibangun jalan tani. Ini sejalan dengan ASTD (1998) yang mengatakan bahwa fasilitator berperan memberikan kesempatan yang luas agar masyarakat secara mandiri menentukan keputusan. Fasilitator bukan sebagai penentu keputusan atas persoalan yang dipilih, tetapi lebih pada upaya membantu secara sistematis proses belajar bagi masyarakat untuk menemukan sendiri kebutuhan dan memecahkan masalah yang dihadapinya (Sumpeno, 2009).

Kepala desa juga memberikan pelatihan atau seminar kepada kelompok-kelompok profesi seperti kelompok tani kelompok pedagang dan BUM Pekon. Kepala Desa Adiluwih memberikan pelatihan kepada kelompok tani agar dapat meningkatkan hasil pertaniannya. Kemudian untuk masyarakat yang membutuhkan administrasi SKU maka akan dibantu oleh kepala desa. Di Sukoharjo III fasilitasi yang diberikan oleh kepala desa dalam bentuk kemudahan administratif pendukung perekonomian seperti penyediaan izin usaha, SKU sebagai syarat pinjaman ke bank. Desa Margosari sendiri memberikan fasilitas kepada masyarakat berupa pelatihan dan seminar untuk menguatkan peran keorganisasian BUM Pekon yang sudah terbentuk agar dapat bekerja secara maksimal. Di Desa Sukaratu memberikan pelatihan kepada kelompok budidaya ikan air tawar agar dapat meningkatkan hasil panennya. Hal tersebut merupakan fungsi dari seorang fasilitator dalam membangun jaringan kerja Fasilitasi yang dilakukan oleh pendamping baik dikalangan pemerintah Lembaga Swadaya Masyarakat atau institusi lain harus menyentuh aspek penguatan jaringan dari tingkat institusi nasional hingga masyarakat. Penguatan jaringan sangat penting dalam membangun kebersamaan, keberlanjutan dan kesiapan masyarakat mengantisipasi perubahan. Jaringan yang dibangun harus mengacu pada optimalisasi program, di mana keterlibatan organisasi masyarakat, LSM, pemerintah, dan institusi lain berjalan secara sinergis (Atrika, 2020). Itu menegaskan bahwa kepala desa di sini hanya sebagai fasilitator yang menghubungkan antara masyarakat dengan pemangku kepentingan atau orang-orang yang berkompeten untuk bicara tentang hal tersebut.

Fasilitator dalam hal lain yaitu mengantisipasi terjadinya bencana alam. Desa subjek penelitian dengan kondisi rawan bencana yaitu desa Margosari yang memang berada di wilayah perbukitan pagelaran utara. Margosari menempati kondisi tanah yang miring sehingga simulasi akan bencana alam kerap dilakukan di sana. Simulasi bencana alam khususnya banjir dan tanah longsor menjadi perhatian khusus. Selain itu pembangunan talut atau siring juga menjadi fokus utama di Desa Margosari. Kemudian Sukoharjo III dan Podosari yang kondisi permukimannya sudah lumayan padat sehingga juga rawan terjadi bencana alam seperti banjir yang disebabkan oleh sampah. Untuk mengantisipasi hal tersebut kepala desa memiliki



program bank sampah yang tujuannya agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan ke selokan dan sungai.

Mobilisator

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam memobilisasi warganya sudah dilakukan dalam berbagai kegiatan pembangunan di desa. Peran mobilisasi dilakukan dengan memberikan instruksi kepada aparatur desa agar dapat disampaikan kepada warganya. Metode ini masif diterapkan di setiap desa karena dianggap efektif untuk memobilisasi masyarakat.

Mobilisasi masyarakat mencakup aspek yang cukup luas apabila berkaitan dengan pembangunan desa. Untuk meningkatkan perekonomian, masyarakat dihimbau dan diarahkan kepala desa untuk memanfaatkan fasilitas ekonomi di desa yang meliputi koperasi maupun BUM Desa. Mobilisasi ini dimaksudkan agar terjadi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan antara desa dengan masyarakat. Kemudian masyarakat yang sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan berimplikasi pada proses mobilisasi yang mudah untuk diimplementasikan. Adanya pandemi covid-19 ini secara tidak langsung menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat. Sehingga proses apapun dalam kegiatan pemerintah desa berkaitan dengan kebersihan lebih mudah dilakukan. Misalnya seperti yang terjadi pada subjek penelitian bahwa peran mobilisasi kepala desa jarang dilakukan. Hal ini karena adanya peraturan tentang penerapan protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Mobilisasi tersebut dilakukan di semua desa, tidak ada upaya khusus antara desa mandiri sampai dengan desa sangat tertinggal.

Terakhir yaitu kepala desa memobilisasi masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tidak terjadi bencana alam. Bencana alam biasanya terjadi karena lingkungan yang tidak kondusif. Misalnya saja banjir, hal ini terjadi karena terganggunya aliran air yang disebabkan oleh beberapa hal seperti pendangkalan parit atau selokan serta penumpukan sampah sehingga air meluap. Desa Margosari yang memang desa rawan bencana alam banjir dan tanah longsor mengajak masyarakat untuk bergotong royong membangun parit agar aliran air dari hulu ke hilir lancar dan tidak terjadi erosi tanah.

Kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah, namun juga menuntut keterlibatan masyarakat yang ingin memperbaiki mutu hidupnya. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan pengejawantahan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Melalui partisipasi yang diberikan masyarakat, disadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah, namun juga menuntut keterlibatan masyarakat yang ingin memperbaiki mutu hidupnya. Seperti yang disampaikan oleh Bintoro Tjokroamidjojo, (2000) yang mengatakan pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinyu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik. Mobilisasi dalam pembangunan desa secara langsung berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Karena itu peran mobilisasi kepala desa ditentukan oleh kesadaran masyarakat akan pembangunan.

Tidak hanya partisipasi masyarakat saja, akan tetapi struktur sosial juga berpengaruh terhadap mobilisasi serta pencapaian tujuan. Abdulsyani (1994) menyebutkan bahwa terdapat 4 fungsi dari struktur sosial yaitu mempertahankan pola, integrasi, pencapaian tujuan, dan adaptasi. Mendukung pernyataan Abdulsyani, Supriatna dalam Yonaldi (2015) menyebutkan bahwa struktur, kultur, dan proses sosial merupakan dasar dari pembangunan permukiman. Struktur sosial dalam pembangunan memberikan pandangan terhadap prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dalam pelaksanaan program, membuat masyarakat menjadi terkoordinasi dalam suatu sistem program, memobilisasi masyarakat dalam penentuan dan pencapaian tujuan yang harus dilaksanakan dalam program, serta hubungan yang didasarkan pada struktur sosial mampu menjadi sarana masyarakat dalam menyesuaikan terhadap perubahan lingkungannya (Wardani, Herwangi, dan Sarwadi 2018)



Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepala desa menjalankan fungsi kepemimpinan yang bersifat satu arah atau instruktif. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah (Rivai dan Mulyadi, 2011; Pasolong, 2015).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa peran kepemimpinan kepala desa dalam peningkatan IDM di Kabupaten Pringsewu sudah dilakukan dengan baik. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa peran tersebut kurang berpengaruh terhadap peningkatan status desa. Ketahanan sosial yang berkontribusi paling besar pada skor IDM karena berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana publik serta waktu tempuh masyarakat untuk mengaksesnya. Fluktuasi status desa terjadi karena adanya perubahan pada jumlah dan porsi alokasi dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa dari tahun 2018, 2019, dan 2020. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap fluktuasi tersebut yaitu struktur sosial dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) kepala desa dan aparatur desa perlu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara melakukan pendekatan secara langsung serta memperbanyak pertemuan atau diskusi dengan masyarakat, sehingga diharapkan kedepannya masyarakat berperan aktif dan dapat diarahkan dalam rangka pembangunan desa; (b) penelitian ini belumlah sempurna, saya rasa masih banyak yang perlu di kaji ulang. Maka saya berpandangan bahwa perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang urgensi peran kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan. Selain itu juga tentang korelasi antara dana desa terhadap status desa dalam IDM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti tidak menerima dana dari siapapun untuk melaksanakan penelitian ini. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintahan desa di Kabupaten Pringsewu yang sudah bersedia diwawancarai di sela-sela pekerjaan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Dira, A., (2020). Peran Pendamping dalam Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. UIN Sultan Syarif Kasim. [http://repository.uin-suska.ac.id/30296/2/GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/30296/2/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf) (13, Mei 2022).
- BPS Kabupaten Pringsewu. (2019). *Kecamatan Adiluwih Dalam Angka 2019*. Kabupaten Pringsewu: CV. Jaya Wijaya.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon. (2018). *Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2018*. Pringsewu.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon. (2019). *Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2019*. Pringsewu.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon. (2020). *Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020*. Pringsewu.
- Hasibuan, M. S. P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2015). *Indeks Desa Membangun*. Kementerian Desa, PDTT RI.
- Wardani, Y. K., Herwangi, Y., dan Sarwadi, A. (2018). Peran Struktur Sosial Dalam Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: PLPBK Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta). *Widya Praja: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 44(1), 1–20, doi: <https://doi.org/10.33701/jipwp.v44i1.215>



- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI. (2016). *Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 2 tentang Indeks Desa Membangun*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Noor, J. (2012). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Prenadamedia Group.
- Rudiah, B. S., dan Susiani, S. (2018). Peran Kepala Desa Sebagai Motivator dalam Meningkatkan Kinerja Aparat di Kantor Desa Halangan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 1(2), 674–692, URL: <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/149>
- Sumpeno, W. (2009). *MENJADI FASILITATOR GENIUS: Kiat-kiat dalam Mendampingi Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Tjokroamidjojo, B. (2000). *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Gunung Agung.
- Utami, S. N. (2011). “Peran Kepala Desa Sebagai Motivator dalam Pembangunan Desa.” Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/23699/Peranan-Kepala-Desa-Sebagai-Motivator-Pembangunan-Desa> (11, Mei 2022).
- Zainal, V. R. & Mulyadi, D. (2011). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Rajawali Pers.